

SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan



ANGGOTA VI BPK RI MENYERAHKAN LHP LKPD TA 2019 PROVINSI GORONTALO MELALUI KEPALA PERWAKILAN BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Kamis (4 Juni 2020) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 atas empat entitas pemeriksaan Kepada Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo. Entitas tersebut adalah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo.

Kegiatan penyerahan LHP LKPD TA 2019 Provinsi Gorontalo dilaksanakan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Bapak Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D, CSFA melalui Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Bapak Rahmadi, SE., Ak, M.M., CSFA, CA. Anggota VI BPK RI mengikuti kegiatan penyerahan LHP LKPD TA 2019 Provinsi Gorontalo dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Gorontalo Ke-18 di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo secara *video conference*.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Gorontalo Ke-18 dilaksanakan dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo TA 2019 oleh BPK RI. Pelaksanaan sidang rapat berjalan dengan khidmat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan atas covid-19. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, DR. Drs. Paris R.A. Jusuf, S.Sos.I, M.Si menerima LHP LKPD TA 2019 langsung dari Anggota VI BPK RI melalui Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sementara Gubernur Gorontalo, Drs. H. Rusli Habibie, M.AP menerima melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Dr. Darda Daraba. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas LKPD Provinsi Gorontalo TA 2019.

Pada hari yang sama, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo juga telah menyerahkan LHP atas LKPD TA 2019 Kota Gorontalo, LHP atas LKPD TA 2019 Kabupaten Bone Bolango dan LHP atas LKPD TA 2019 Kabupaten Gorontalo. Penyerahan LHP dilaksanakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan menerapkan protokol kesehatan berkenaan pandemi covid-19. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ketiga entitas pemeriksaan tersebut memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

Anggota VI BPK RI, Bapak Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D, CSFA mewakili Pimpinan BPK RI mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 H kepada seluruh peserta rapat paripurnas istimewa. Beliau menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin serta berharap seluruh peserta yang hadir selalu dalam keadaan sehat. Anggota VI BPK menyampaikan pula ucapan selamat atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Gorontalo mempertahankan opini WTP untuk yang ketujuh kalinya.

Namun demikian, meskipun telah memperoleh opini WTP, masih ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal tersebut diantaranya adalah Permasalahan berkaitan dengan kegiatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. BPK masih menjumpai biaya pembangunan rumah layak huni yang diserahkan kepada Pelaksana Swakelola dipotong PPN 10% sehingga pemerintah provinsi tidak dapat menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu terdapat permasalahan Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi TA 2019 yang merupakan temuan pemeriksaan berulang seperti hibah Aset belum terverifikasi, dan pencatatan Aset masih secara gabungan. Kedua hal tersebut dimuat dalam **Buku II** (LHP atas Sistem Pengendalian Intern) dan **Buku III** (LHP atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan).